

Peraturan di Negeraku

Bab 3

Tujuan

Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. menjelaskan peraturan-peraturan yang terdapat di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan negara;
2. menguraikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
3. menganalisis peran lembaga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bernegara;
4. mendeskripsikan makna yang terkandung dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.



Peraturan di Negaraku



A

Peraturan di Rumahku, Sekolahku, Lingkunganku, dan Negaraku

1. Pengertian Peraturan
Kata “peraturan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti ‘tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur’. Sementara itu, kata “mengatur” mengandung arti ‘membuat (menyusun) sesuatu menjadi teratur (rapi)’. Di dalam suatu peraturan, ada tuntutan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan (Anwar H.M., 2020).



A

Peraturan di Rumahku, Sekolahku, Lingkunganku, dan Negaraku

2. Peraturan di Rumahku

Ada beberapa tujuan peraturan keluarga. Di antaranya sebagai berikut (Bodman, dkk., 2022).

- a. Peraturan keluarga membuat anggota keluarga bertanggung jawab atas tindakan mereka (Cronen, Pearce, dan Harris, 1979).
- b. Aturan keluarga juga membantu anggota keluarga mengetahui batasan-batasan yang ada antara keluarga dan lingkungannya.
- c. Peraturan keluarga terkait dengan pembagian tanggung jawab antara anggota keluarga.



A

Peraturan di Rumahku, Sekolahku, Lingkunganku, dan Negaraku

3. Peraturan di Sekolahku

- ✓ Peraturan yang berlaku bagi peserta didik di sekolah meliputi peraturan sekolah dan peraturan kelas. Peraturan sekolah maupun peraturan kelas berisi berbagai hal yang menuntun peserta didik dalam berperilaku sehari-hari di sekolah (Widodo, 2019).



A

Peraturan di Rumahku, Sekolahku, Lingkunganku, dan Negaraku

4. Peraturan di Lingkunganku

Di lingkungan masyarakat, tentu ada norma atau kaidah yang diterapkan untuk mengatur perilaku semua orang di lingkungan tersebut (Setiawan, dkk., 2022). Aturan tersebut biasanya memuat kewajiban-kewajiban warga terkait dengan kerukunan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.



A

Peraturan di Rumahku, Sekolahku, Lingkunganku, dan Negaraku

5. Peraturan di Negaraku

Sifat-sifat khusus peraturan negara adalah sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua (Armawi, 2019).

- 1) Memaksa, artinya negara mempunyai hak atau kewenangan untuk memaksakan berbagai peraturan yang disusun
- 2) Monopoli, artinya negara mempunyai hak atau kewenangan untuk mengelola atau menentukan suatu Tindakan
- 3) Mencakup semua, artinya seluruh peraturan perundang undangan berlaku untuk seluruh warga negara tanpa kecuali.



B

Pengertian Hierarki Peraturan Perundang undangan

1. Teori Hierarki Norma

- ✓ Secara teori, hierarki peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan teori Stufenbau des Recht atau The Hierarchy of Law (hierarki hukum) dari Hans Kelsen.
- ✓ Menurut teori hukum murni, dalam pembentukan dan penerapannya, hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur nonhukum, seperti moral, politik, sosial, dan psikologis.



B Pengertian Hierarki Peraturan Perundang undangan

2. Penerapan Hierarki Peraturan di Indonesia Ajaran tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia dalam pandangan Bagir Manan mengandung beberapa prinsip berikut (Palullungan, 2023).

- a. Peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi
- b. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus bersumber atau mempunyai dasar hukum
- c. Materi yang terdapat dalam perundangan-undangan tidak boleh berlawanan
- d. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti,



B Pengertian Hierarki Peraturan Perundang undangan

3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu sebagai berikut.

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan



C

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

1. UUD NRI Tahun 1945
2. Ketetapan MPR (Tap MPR)
3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
 - Peraturan daerah provinsi
 - Peraturan daerah kabupaten/kota



D Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1. Terkait dengan pelaksanaan undang-undang, salah satu fungsi DPR adalah fungsi pengawasan.
2. Penegakan Hukum terkait Implementasi Peraturan Dari UUD NRI Tahun 1945, dapat diketahui bahwa proses penegakan hukum dan keadilan mempunyai kaitan erat dengan kekuasaan kehakiman.



E

Komitmen Penerapan Peraturan Perundang undangan di Indonesia

1. Asas-Asas dalam Peraturan Perundang-undangan
 - a. Asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan
 - b. Asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
 - c. Asas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan
2. Komitmen Menerapkan Peraturan Perundang-undangan, dalam menerapkan hierarki peraturan perundang-undangan, setiap warga negara harus memiliki komitmen yang kuat

